



PENDATAAN PMKS TAHUN 2024

DINAS SOSIAL, PPPA
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Probolinggo Tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola perlindungan sosial dan peningkatan efektivitas pelayanan kepada kelompok rentan di wilayah Kota Probolinggo. Dokumen ini memuat hasil pendataan, pemetaan, serta analisis kondisi sosial masyarakat yang mengalami kerentanan akibat faktor ekonomi, disabilitas, keterlantaran, ketunaan sosial, dan berbagai kondisi lainnya.

Melalui laporan ini, disajikan hasil pendataan, pemetaan wilayah, dan analisis kondisi PMKS di Kota Probolinggo berdasarkan kategori dan kebutuhan layanan dasar. Upaya penanganan dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Sosial Kota Probolinggo dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan masyarakat.

Harapannya, laporan ini dapat menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja tahunan serta meningkatkan efektivitas pelayanan sosial dasar bagi kelompok rentan. Selain itu, laporan ini diharapkan mendorong sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang peduli, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan sosial.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Segala masukan, saran, dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Probolinggo, Maret 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



Dr. REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
Pemula Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Manfaat	3
1.4 Sasaran.....	4
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB II TINJAUAN TEORI.....	5
2.1 Definisi PMKS	5
2.2 Jenis PMKS.....	5
2.3 Pendataan PMKS.....	15
BAB III METODOLOGI.....	16
3.1 Lingkup Pelaksanaan.....	16
3.2 Jadwal Kegiatan.....	17
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	18
3.4 Metode Penelitian	20
3.5 Metode Analisis.....	22
BAB IV GAMBARAN UMUM	24
4.1 Kondisi Geografis Kota Probolinggo	24
4.2 Kependudukan	25
4.3 Kondisi PMKS di Kota Probolinggo	26
4.4 Jenis PMKS di Kota Probolinggo	27
4.5 Data PMKS Tahun 2024	28
BAB V PEMBAHASAN	30
5.1 Hasil Pendataan PMKS Tahun 2024 Kota Probolinggo	30
5.2 Hasil Pendataan PMKS Tahun 2024 Per Kecamatan	36
BAB VI KESIMPULAN.....	47
BAB VII PENUTUP.....	49
BAB VIII LAMPIRAN	50
8.1 Format Form Pendataan PMKS	50
8.2 Dokumentasi Pelaksanaan Pendataan PMKS	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesejahteraan Sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para PMKS melalui program pelayanan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya. Dengan semakin terbukanya era globalisasi mengakibatkan semua aspek kehidupan harus dipersiapkan untuk bersaing dalam globalisasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi bahwa isu-isu permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan-benturan kepentingan di antara aspek-aspek kehidupan manusia. Suatu kenyataan bahwa hasil dari benturan-benturan kepentingan dimaksud pada akhirnya akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial. Permasalahan politik berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan hukum berujung dengan permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung dengan permasalahan sosial, dan lain-lain. Tetapi, tidak pernah terjadi bahwa permasalahan ekonomi berakhir dengan permasalahan politik dan berhenti hanya di situ saja. Tetapi, dipastikan akan berakhir dengan permasalahan sosial. Pada situasi seperti ini, permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya masalah sosial konvensional saja seperti permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia, tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusakan antar etnis, kesewenang wenangan, penghakiman sendiri, termasuk di dalamnya permasalahan kelompok masyarakat mulai dari kelompok kelas bawah hingga kelompok elit, seperti disharmonisasi keluarga, stress, dan lain-lain. Sudah barang tentu permasalahan sosial seperti ini sangat bervariasi. Secara umum ada beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Di masa mendatang, permasalahan sosial ini akan semakin kompleks dan besar dan selalu terkait dengan isu-isu yang lainnya. Karena itu, isu-isu tersebut seperti

harus diantisipasi perkembangannya sehingga permasalahan sosial tidak menyebar dan berkembang apa lagi membawa dampak yang lebih besar, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada disfungsi sosial, Permasalahan sosial ini tentunya harus diantisipasi pencegahan dan penanganannya di lapangan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya Kota Probolinggo.

Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya utamanya dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Probolinggo, Laporan ini disusun oleh Tim Komite PMKS yang dibentuk oleh Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Probolinggo.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan akuntabel berupa angka tentang karakteristik atau ciri - ciri khusus yang dapat dianalisis untuk mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo pada Tahun 2024.

1.2.2 Tujuan

Pendataan PMKS dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu:

A. Mencari tahu kondisi dan kebutuhan PMKS;

Pendataan membantu mengidentifikasi jenis, jumlah, dan karakteristik PMKS yang ada di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan masalah yang dialami

B. Merencanakan program kesejahteraan sosial;

Data PMKS digunakan sebagai dasar dalam merencanakan program-program kesejahteraan sosial, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

C. Mononitor dampak program;

Data PMKS juga digunakan untuk memantau dampak program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan, apakah sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan PMKS.

D. Meningkatkan kualitas pelayanan

Dengan data yang akurat dan lengkap, pemerintah dan lembaga terkait dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada PMKS, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial antara lain untuk :

A. Dasar perencanaan dan kebijakan;

Data yang akurat dan terperinci tentang PMKS dan PSKS memungkinkan pemerintah untuk merancang program dan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

B. Pemetaan masalah sosial;

Pendataan membantu dalam pemetaan masalah sosial yang ada di suatu wilayah, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dan menentukan prioritas penanganan.

C. Peningkatan efektifitas pelayanan;

Dengan mengetahui jumlah dan jenis PMKS serta PSKS, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan sosial yang diberikan, termasuk bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan.

D. Pengambilan keputusan yang lebih baik; dan

Data pendataan PMKS dan PSKS memberikan informasi yang komprehensif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam penanganan masalah sosial.

E. Pemantauan perubahan sosial.

Pendataan juga memungkinkan pemantauan perubahan sosial dari waktu ke waktu, baik dari segi populasi, masalah yang muncul, maupun persebarannya.

1.4 Sasaran

Sasaran pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah orang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Pendataan PMKS bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui jenis, jumlah, serta karakteristik PMKS yang ada di suatu wilayah, agar dapat dilakukan penanganan yang tepat dan terarah.

1.5 Ruang Lingkup

Lingkup wilayah dari Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah di semua wilayah kecamatan yang ada di Kota Probolinggo yaitu Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopak dan Kecamatan Kanigaran.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Definisi PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya secara wajar akibat kondisi sosial, ekonomi, fisik, maupun psikologis yang tidak menguntungkan. Mereka termasuk kelompok rentan yang memerlukan perhatian, perlindungan, serta intervensi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial.

Kelompok PMKS mencakup beragam kategori, seperti anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, korban kekerasan, korban perdagangan orang, penyalahguna napza, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga korban bencana alam dan sosial. Kondisi mereka tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi, tetapi juga dapat memengaruhi ketahanan sosial masyarakat secara luas.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Rencana Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2025, menempatkan penanganan PMKS sebagai bagian penting dari upaya pembangunan sosial yang berkeadilan dan inklusif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, dengan menekankan pada kolaborasi lintas sektor serta pemberdayaan masyarakat.

Program penanganan PMKS di Kota Probolinggo diarahkan pada upaya identifikasi dini, pelayanan berbasis data terpadu, peningkatan kapasitas lembaga sosial, serta penguatan jejaring kemitraan antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha. Diharapkan, melalui pendekatan ini, PMKS tidak hanya terbantu secara langsung, tetapi juga dapat tumbuh menjadi pribadi dan komunitas yang mandiri dan produktif.

Transformasi kebijakan ini mencerminkan komitmen Kota Probolinggo untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, setara, dan berdaya, di mana tidak ada satu pun kelompok rentan yang tertinggal dalam pembangunan.

2.2 Jenis PMKS

Pengelompokan jenis PMKS dilakukan untuk memetakan kebutuhan intervensi yang berbeda bagi setiap kelompok. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mendefinisikan 26 jenis PMKS, antara lain:

- 1) Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
- c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

- 2) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- 3) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
- b. didakwa; atau
- c. dijatuhi pidana

- 4) Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.

- 5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

- 6) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

- 7) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

- 8) Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

- 9) Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10)Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11)Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12)Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan

- d. memperlakus sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14) Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16)Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17)Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18)Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19)Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak

kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami penelantaran;
- c. mengalami tindakan eksploitasi;
- d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - tindak kekerasan;
 - eksploitasi;
 - penelantaran;
 - pengusiran (deportasi);
 - ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - mengalami trafficking.

21) Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22) Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan c. dampak psikologis.

23) Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

25) Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26) Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

2.3 Pendataan PMKS

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo. Dengan data yang akurat dan terverifikasi, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan di masyarakat.

Proses pendataan PMKS dilakukan secara sistematis dan berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Mekanisme ini melibatkan berbagai pihak, seperti petugas sosial, kader masyarakat, perangkat kelurahan, serta Dinas Sosial Kota Probolinggo. Pendekatan partisipatif juga digunakan dalam proses pendataan, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga sosial agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Pendataan dilakukan dengan merujuk pada 26 kategori PMKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Setiap individu atau keluarga yang teridentifikasi sebagai PMKS dicatat dalam formulir standar dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga mengembangkan basis data lokal untuk menjangkau PMKS non-DTKS yang belum tercakup dalam data nasional.

Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa data yang dimiliki selalu mutakhir, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini menjadi penting dalam konteks transformasi kebijakan sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya.

Dengan sistem pendataan yang kuat, Pemerintah Kota Probolinggo berharap dapat mempercepat penanganan PMKS secara lebih tepat sasaran dan mendorong perwujudan kesejahteraan sosial yang merata di seluruh wilayah kota.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Lingkup Pelaksanaan

Lingkup pelaksanaan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo melibatkan beberapa tahapan penting yang saling terkait dan bersifat integratif. Metodologi yang digunakan bertumpu pada pendekatan partisipatif, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik lokal.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

A. Identifikasi dan Klasifikasi PMKS

Kegiatan ini mencakup proses pendataan lapangan yang sistematis untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang masuk dalam kategori PMKS sesuai dengan pedoman dari Kementerian Sosial RI. Data dikumpulkan melalui survei lapangan, wawancara, dan koordinasi dengan kelurahan, kader sosial, serta tokoh masyarakat.

B. Verifikasi dan Validasi Data

Data yang telah dikumpulkan akan diverifikasi secara berlapis oleh tim dari Dinas Sosial dan perangkat kelurahan guna memastikan akurasi dan kelayakan penerima program. Proses ini juga bertujuan untuk menyesuaikan data lokal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun sistem informasi sosial lainnya.

Pemetaan Wilayah dan Persebaran PMKS. Dengan memanfaatkan data spasial dan kependudukan, dilakukan pemetaan wilayah yang menunjukkan persebaran PMKS per kecamatan dan kelurahan. Hal ini menjadi dasar perencanaan intervensi dan alokasi sumber daya agar program lebih tepat sasaran.

C. Penyusunan Rencana Intervensi

Intervensi dirancang berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan kapasitas yang tersedia di wilayah masing-masing. Intervensi dapat berupa bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, rujukan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

D. Pelaksanaan Program dan Monitoring

Program dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah kota, dinas teknis, dan mitra kerja seperti LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). Selama pelaksanaan, dilakukan monitoring berkala untuk mengevaluasi efektivitas, partisipasi masyarakat, dan kendala yang dihadapi di lapangan.

E. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil, dampak sosial, serta kualitas layanan terhadap kelompok PMKS. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan program di tahun berikutnya.

3.2 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pendataan PMKS tahun 2024 dirancang dalam beberapa tahapan utama yang terstruktur untuk memastikan kelancaran dan akurasi proses pendataan. Jadwal kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

	Awal (tgl/bln/thn)				Akhir (tgl/bln/thn)		
A. Perencanaan							
1. Perencanaan Kegiatan	01	12	2023	s.d.	15	12	2023
2. Desain	18	12	2023	s.d.	31	12	2023
B. Pengumpulan							
3. Pengumpulan Data	02	01	2024	s.d.	31	12	2024
C. Pemeriksaan							
4. Pengolahan Data	02	01	2025	s.d.	31	01	2025
D. Penyebarluasan							
5. Analisis	03	02	2025	s.d.	05	02	2025
6. Diseminasi Hasil	05	02	2025	s.d.	14	05	2025
7. Evaluasi	19	05	2025	s.d.	30	05	2025

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penggunaan data yang akurat dan tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, dalam pengumpulan dan analisis data, jenis sumber data yang digunakan terdiri dari beberapa kategori yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi langsung dengan PMKS dan pemangku kepentingan terkait. Jenis data ini sangat penting untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi aktual di tingkat masyarakat. Sumber data primer meliputi:

- **Wawancara Langsung:** Dilakukan dengan individu atau keluarga yang teridentifikasi sebagai PMKS untuk menggali lebih dalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan mereka.
- **Survei Lapangan:** Pengumpulan data kuantitatif melalui kuesioner yang diberikan kepada PMKS atau masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS. Survei ini sering kali dilakukan oleh petugas sosial atau kader masyarakat.
- **Observasi Partisipatif:** Pengamatan langsung terhadap kondisi kehidupan sehari-hari PMKS yang dilakukan oleh petugas atau kader sosial di komunitas yang bersangkutan.
- **Fokus Grup Diskusi (FGD):** Diskusi yang melibatkan sekelompok PMKS, tokoh masyarakat, atau pihak terkait untuk mendapatkan informasi kualitatif yang lebih mendalam.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, atau data yang telah ada sebelumnya yang disediakan oleh lembaga atau instansi pemerintah maupun organisasi lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai situasi dan kondisi yang terjadi. Sumber data sekunder meliputi:

- **Data Kependudukan:** Informasi mengenai jumlah penduduk, komposisi usia, tingkat pendidikan, dan data demografis lainnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- **Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS):** Data yang disediakan oleh Kementerian Sosial yang mencakup informasi mengenai individu atau keluarga yang berisiko sosial dan membutuhkan bantuan sosial.
- **Laporan dan Studi Sebelumnya:** Dokumen yang dihasilkan dari penelitian atau laporan pemerintah yang terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi di Kota Probolinggo, seperti laporan tahunan Dinas Sosial, laporan penanggulangan kemiskinan, dan lainnya.
- **Data Administrasi Kesejahteraan Sosial:** Data yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial mengenai keluarga atau individu yang telah menerima bantuan sosial atau program kesejahteraan sosial lainnya.

C. Sumber Data Lainnya

Sumber data lainnya mencakup informasi yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung berkaitan dengan PMKS, namun relevan dalam konteks perencanaan dan implementasi program sosial. Sumber data lainnya meliputi:

Pemetaan Wilayah: Data spasial atau peta yang menunjukkan distribusi PMKS, status sosial ekonomi, dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial.

- **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau organisasi sosial lainnya:** Data yang dikumpulkan oleh mitra yang bekerja di lapangan, misalnya data yang diperoleh oleh PSM yang berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan atau penanganan bencana.
- **Media Massa dan Laporan Publik:** Informasi yang diperoleh dari media massa lokal, laporan berita, atau survei yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar yang relevan dengan isu PMKS di wilayah setempat.

3.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Pendataan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) menggunakan jenis pengumpulan data kompilasi produk administrasi (kompromin), proses ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang mengandalkan dokumen dan catatan administratif dari berbagai instansi sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data dalam pendekatan kompromin dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Survei lapangan

Pendataan PMKS sering melibatkan survei lapangan, di mana petugas pendata mengunjungi wilayah tertentu untuk mengidentifikasi dan mendata PMKS secara langsung. Metode ini memungkinkan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan mendalam tentang kebutuhan dan kondisi PMKS.

B. Pengumpulan data dari berbagai sumber

Pengumpulan ini meliputi informasi dari organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait. Penggunaan sistem informasi memungkinkan manajemen data PMKS yang lebih efisien dan terintegrasi, antara lain:

- Inventarisasi dokumen administratif dari instansi terkait (Dinas Sosial, Dukcapil, Bappeda, LKS, dan instansi lain).
- Kompilasi data dari sistem digital seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG), DTKS, dan laporan rutin dari petugas sosial (TKSK, PSM, Pendamping PKH).
- Sinkronisasi dan harmonisasi data dari berbagai sumber agar tidak terjadi duplikasi atau inkonsistensi antar-wilayah.
- Validasi terbatas lapangan, dilakukan hanya pada data yang tidak lengkap atau tidak sinkron.

C. Sistem Informasi

Penggunaan sistem informasi pendataan PMKS semakin umum. Sistem ini memungkinkan untuk mengelola data PMKS secara lebih efisien, terintegrasi, dan memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Sistem informasi juga dapat mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi.

D. Penggunaan Teknologi

Beberapa daerah juga mulai menggunakan teknologi seperti aplikasi mobile atau perangkat lunak khusus untuk memudahkan proses pendataan dan pengelolaan data PMKS. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendataan.

Instrumen utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah kuesioner dalam format Microsoft Excel, yang disusun oleh Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kuesioner ini mencakup variabel-variabel penting seperti pada tabel berikut:

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi
1	NIK	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia
2	Nama	Nama Orang	Nama dari masing-masing PMKS yang didata
3	Jenis Kelamin	Jenis Kelamin	jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki
4	Alamat	Alamat	Alamat lengkap PMKS, termasuk RT, RW, Kelurahan, Kecamatan
5	Jenis PMKS	Status PMKS	kriteria bagi seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan

No.	Nama Variabel (Karakteristik)	Konsep	Definisi
			atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya
6	Jenis Disabilitas	Disabilitas	Kriteria bagi seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak

3.5 Metode Analisis

Dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo, metode analisis yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, merumuskan permasalahan utama, serta menentukan prioritas intervensi yang tepat dan efektif. Metode analisis yang diterapkan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi sosial masyarakat.

Adapun metode analisis yang digunakan antara lain sebagai berikut:

A. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengolah dan menyajikan data numerik dari hasil survei, pendataan lapangan, maupun data sekunder seperti DTKS, data kependudukan, dan data PMKS dari Dinas Sosial. Data dianalisis dengan cara menghitung jumlah, persentase, distribusi, dan tren perubahan untuk memahami profil PMKS menurut kategori, usia, jenis kelamin, dan wilayah. Tujuan dari analisis ini adalah memberikan gambaran statistik yang objektif mengenai situasi kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo.

B. Analisis Kualitatif Tematik

Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang tidak selalu tercermin dalam data kuantitatif. Misalnya, persepsi masyarakat terhadap layanan sosial, hambatan yang dirasakan oleh PMKS, atau pola relasi sosial yang mempengaruhi keberhasilan program. Temuan kualitatif ini memperkaya pemahaman dan mendukung perumusan kebijakan yang lebih kontekstual.

C. Analisis Spasial Wilayah

Untuk melihat sebaran geografis PMKS di Kota Probolinggo, digunakan pendekatan analisis spasial berbasis peta wilayah. Dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG), lokasi kelompok rentan dapat dipetakan berdasarkan kelurahan, sehingga intervensi program dapat disesuaikan dengan konsentrasi permasalahan. Analisis ini sangat membantu dalam mengintegrasikan faktor geografis dengan kondisi sosial ekonomi di masing-masing wilayah.

D. Analisis Prioritas Kebutuhan (Needs Assessment)

Berdasarkan hasil kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif, dilakukan penilaian kebutuhan untuk menentukan kelompok sasaran prioritas, bentuk layanan yang paling mendesak, serta jenis bantuan atau program pemberdayaan yang diperlukan. Analisis ini berperan penting dalam memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan urgensi dan dampak sosial yang diharapkan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kondisi Geografis Kota Probolinggo

Kota Probolinggo terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah timur Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah sekitar 56,67 km². Secara geografis, kota ini berada di dataran rendah dengan ketinggian antara 4 hingga 36 meter di atas permukaan laut dan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 7 kilometer. Letaknya yang strategis di jalur utama transportasi nasional menjadikan Kota Probolinggo sebagai simpul penting kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kawasan barat dan timur Jawa Timur.

Kondisi geografis yang cukup beragam ini memengaruhi distribusi penduduk dan karakteristik sosial masyarakatnya. Wilayah pesisir utara yang berbatasan langsung dengan Selat Madura cenderung dihuni oleh komunitas nelayan dan masyarakat berpendapatan rendah, yang sering kali menghadapi tantangan sosial dan ekonomi seperti keterbatasan akses pendidikan, sanitasi, dan layanan kesehatan. Sementara itu, kawasan padat penduduk di pusat kota dan area urban lainnya memiliki masalah sosial yang berbeda, seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan kerentanan terhadap kekerasan atau eksploitasi.

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Probolinggo menunjukkan bahwa kelompok-kelompok rentan tersebar secara tidak merata di seluruh kecamatan. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses ekonomi terbatas cenderung mencatat jumlah PMKS yang lebih besar. Misalnya, kategori anak terlantar, lansia tanpa pengasuh, penyandang disabilitas, dan gelandangan lebih banyak ditemukan di kawasan urban dan pesisir yang padat, di mana tekanan sosial dan ekonomi lebih tinggi.

Pemerintah Kota Probolinggo telah memanfaatkan informasi geografis ini untuk mendukung proses pendataan dan pemetaan PMKS secara lebih presisi. Dengan pendekatan berbasis wilayah dan data spasial, intervensi sosial dapat lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program perlindungan dan pemberdayaan sosial, termasuk bantuan sosial dan rehabilitasi, benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Dengan memahami keterkaitan antara kondisi geografis dan distribusi PMKS, Pemerintah Kota Probolinggo dapat merancang kebijakan sosial yang lebih responsif,

berbasis data, dan kontekstual, dalam rangka mewujudkan pembangunan sosial yang adil dan merata di seluruh wilayah kota.

4.2 Kependudukan

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota sedang di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Probolinggo pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 240.000 jiwa, yang tersebar di 5 kecamatan dan 29 kelurahan. Kepadatan penduduk rata-rata mencapai lebih dari 4.000 jiwa per km², menjadikan kota ini sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi di kawasan tapal kuda Jawa Timur.

Struktur penduduk Kota Probolinggo didominasi oleh kelompok usia produktif, namun juga terdapat proporsi signifikan dari kelompok usia lanjut dan anak-anak, yang keduanya termasuk dalam kategori rentan secara sosial dan ekonomi. Selain itu, adanya mobilitas penduduk dari daerah sekitar, seperti Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Lumajang, juga memberi tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja, layanan dasar, dan hunian yang layak.

Kondisi kependudukan ini turut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Berdasarkan data Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, kelompok PMKS yang paling banyak ditemukan antara lain adalah penyandang disabilitas, fakir miskin, dan lansia.

Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemerataan ekonomi dan sosial berkontribusi terhadap munculnya masalah seperti pengangguran, ketimpangan akses layanan, dan meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota dalam merancang program pembangunan sosial yang efektif dan tepat sasaran.

Melalui integrasi data kependudukan dengan data PMKS dalam sistem informasi kesejahteraan sosial (seperti DTKS dan data lokal), Pemerintah Kota Probolinggo berupaya memperkuat intervensi sosial berbasis data. Pendekatan ini penting untuk merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika demografi kota, sekaligus menjamin bahwa kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

4.3 Kondisi PMKS di Kota Probolinggo

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo merupakan bagian penting yang harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah PMKS di kota probolinggo menunjukkan angka yang masih cukup signifikan dan tersebar di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di wilayah padat penduduk dan kawasan pesisir.

PMKS di Kota Probolinggo mencakup berbagai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Beberapa kategori yang paling dominan antara lain:

- a. Anak terlantar, yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin atau orang tua yang tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan.
- b. Lansia terlantar, terutama yang tinggal sendiri tanpa pendamping keluarga dan mengalami keterbatasan ekonomi.
- c. Penyandang disabilitas, baik fisik maupun mental, yang masih menghadapi hambatan dalam akses layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan.
- d. Keluarga bermasalah sosial psikologis, termasuk yang terdampak perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau tekanan ekonomi berat.
- e. Pekerja anak dan anak jalanan, yang dipicu oleh kemiskinan struktural dan kurangnya pengawasan orang tua.
- f. Gelandangan dan pengemis (gepeng), yang masih sering ditemukan di area pusat kota, pasar, dan lokasi publik lainnya.
- g. Korban penyalahgunaan napza, yang umumnya berasal dari kalangan remaja dan usia produktif.

Faktor penyebab munculnya PMKS di Kota Probolinggo sangat beragam, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses layanan dasar, hingga urbanisasi yang tidak terkontrol. Situasi ini diperparah dengan kondisi keluarga yang rapuh, minimnya dukungan sosial, serta keterbatasan layanan rehabilitasi sosial yang tersedia.

4.4 Jenis PMKS di Kota Probolinggo

Kota Probolinggo, sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari berbagai permasalahan sosial yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial secara aktif melakukan identifikasi, pendataan, dan penanganan terhadap berbagai kelompok yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS merupakan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan sosial tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai, sehingga memerlukan intervensi dari negara, lembaga sosial, atau masyarakat.

Berdasarkan hasil pemetaan lokal, berikut ini adalah jenis-jenis PMKS yang teridentifikasi di wilayah Kota Probolinggo, antara lain:

- 1) Anak Terlantar
- 2) Anak Yg Berhadapan Dengan Hukum
- 3) Anak Jalanan
- 4) Anak Dengan Kedisabilitasan
- 5) Anak Yg Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah
- 6) Anak Yg Memerlukan Perlindungan Khusus
- 7) Lanjut Usia Terlantar
- 8) Penyandang Disabilitas
- 9) Gelandangan
- 10) Pengemis
- 11) Pemulung
- 12) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Bwblp)
- 13) Orang Dengan Hiv/ Aids
- 14) Korban Penyalhgunaan Napza
- 15) Korban Tindak Kekerasan Atau Yang Diperlakukan Salah
- 16) Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- 17) Korban Bencana Alam
- 18) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- 19) Fakir Miskin
- 20) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

4.5 Data PMKS Tahun 2024

Hasil pendataan PMKS tahun 2024 mencerminkan jumlah, jenis, dan sebaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di berbagai wilayah. Data ini diperoleh melalui proses kompilasi administrasi (kompromin) dan pengisian kuesioner oleh petugas lapangan, yang kemudian direkapitulasi dalam bentuk tabel untuk memudahkan analisis dan pelaporan.

Rekapitulasi data hasil pendataan PMKS Kota Probolinggo tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0
2	ANAK TERLANTAR	97
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	7
4	ANAK JALANAN	25
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	292
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	22
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	881
8	LANJUT USIA TERLANTAR	171
9	PENYANDANG DISABILITAS	1900
10	TUNA SUSILA	0
11	GELANDANGAN	18
12	PENGEMIS	124
13	PEMULUNG	42
14	KELOMPOK MINORITAS	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)	28
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	32
17	KORBAN PENYALHGUNAAN NAPZA	3
18	KORBAN TRAFICKING	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	47
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	1
21	KORBAN BENCANA ALAM	647

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	1791
24	FAKIR MISKIN	99734
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	62
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0

Keterangan : Sumber data Fakir Miskin merupakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Periode 27 Desember 2024.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pendataan PMKS Tahun 2024 Kota Probolinggo

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilaksanakan pada tahun 2024 telah menghasilkan data yang komprehensif dan representatif, yang dapat dibuktikan melalui penyajian tabel dan grafik sebagai media visualisasi data. Tabel dan grafik tersebut berfungsi sebagai alat bantu analisis untuk menampilkan tren, distribusi, serta proporsi berbagai kategori PMKS yang teridentifikasi selama proses pendataan berlangsung. Dengan demikian, tabel dan grafik ini tidak hanya menjadi bukti visual dari capaian pelaksanaan kegiatan pendataan, tetapi juga memperkuat validitas data yang telah dihimpun, serta memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih jauh, data ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis dan intervensi program sosial yang lebih terarah, efisien, dan tepat sasaran oleh pihak-pihak yang berwenang dalam penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Probolinggo.

Berikut rekapitulasi data hasil pendataan PMKS Kota Probolinggo tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0
2	ANAK TERLANTAR	97
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	7
4	ANAK JALANAN	25
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	292
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	22
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	881
8	LANJUT USIA TERLANTAR	171
9	PENYANDANG DISABILITAS	1900
10	TUNA SUSILA	0
11	GELANDANGAN	18

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
12	PENGEMIS	124
13	PEMULUNG	42
14	KELOMPOK MINORITAS	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)	28
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	32
17	KORBAN PENYALHGUNAAN NAPZA	3
18	KORBAN TRAFICKING	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	47
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	1
21	KORBAN BENCANA ALAM	647
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	1791
24	FAKIR MISKIN	99734
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	62
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0

Data pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2024 yang terdiri dari 26 kategori menunjukkan dinamika dan sebaran yang sangat beragam di antara kelompok-kelompok yang teridentifikasi. Dari data tersebut, terlihat bahwa terdapat sejumlah kelompok yang mendominasi jumlah kasus, sementara beberapa kategori lainnya tercatat dengan jumlah yang sangat rendah atau bahkan nihil.

A. Kategori PMKS dengan Jumlah Tertinggi

Berdasarkan data, kelompok Fakir Miskin mencatat jumlah tertinggi, yakni sebanyak 99.734 individu, yang secara signifikan melebihi kategori lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah sosial paling dominan dan kompleks yang dihadapi masyarakat. Faktor-faktor struktural seperti pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta

keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar menjadi penyebab utama tingginya angka ini.

Selanjutnya, kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berada di posisi kedua dengan jumlah 1.791 orang, diikuti oleh Penyandang Disabilitas sebanyak 1.900 orang, dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 881 anak. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan dengan kondisi ekonomi sulit masih sangat membutuhkan intervensi yang komprehensif, baik dari segi perlindungan sosial, akses layanan dasar, maupun pemberdayaan ekonomi.

B. Kategori Anak dan Lansia

Kelompok anak juga menunjukkan angka yang cukup mencolok, khususnya pada kategori:

- Anak Terlantar: 97 orang
- Anak Jalanan: 25 orang
- Anak dengan Kedisabilitas: 292 orang
- Anak Korban Kekerasan: 22 orang
- Anak Memerlukan Perlindungan Khusus: 881 orang

Total akumulatif dari berbagai kategori anak mencapai lebih dari 1.300 kasus, menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan anak di berbagai aspek. Sementara itu, Lanjut Usia Terlantar berjumlah 171 orang, menandakan bahwa kelompok lansia juga menjadi bagian penting dalam perhatian kebijakan sosial.

C. Kategori dengan Jumlah Menengah

Beberapa kategori lain yang juga menunjukkan angka cukup signifikan antara lain:

- Pengemis: 124 orang
- Pemulung: 42 orang
- Korban Kekerasan atau Perlakuan Salah: 47 orang
- Orang dengan HIV/AIDS (ODHA): 32 orang

- Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP): 28 orang
- Anak Jalanan: 25 orang

Kelompok ini umumnya menghadapi masalah keterpinggiran sosial, diskriminasi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial yang terbatas.

D. Kategori dengan Jumlah Rendah atau Nol

Terdapat beberapa kategori yang jumlahnya sangat rendah atau bahkan tidak tercatat sama sekali, seperti:

- Anak Balita Terlantar: 0
- Tuna Susila: 0
- Kelompok Minoritas: 0
- Korban Trafficking: 0
- Korban Bencana Sosial: 0
- Komunitas Adat Terpencil: 0

Ketiadaan data dalam kategori ini bisa diartikan sebagai dua hal: pertama, memang tidak ditemukan kasus pada kelompok tersebut di wilayah pendataan; atau kedua, terdapat keterbatasan dalam metode identifikasi dan pelaporan, sehingga belum tercakup secara memadai.

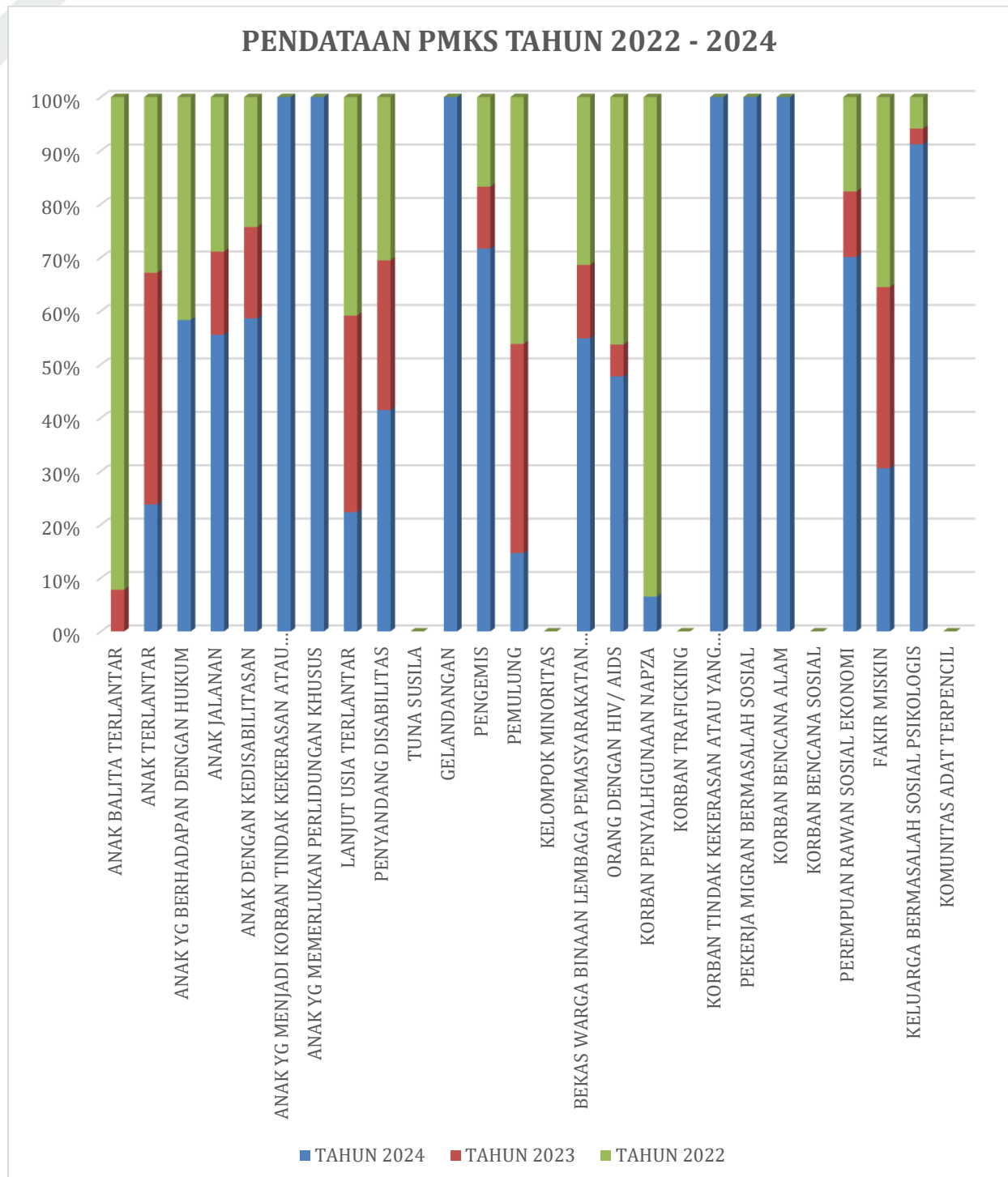
E. Implikasi dan Rekomendasi

Data ini memberikan gambaran faktual yang penting sebagai dasar kebijakan dan perencanaan program kesejahteraan sosial ke depan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memberikan perhatian lebih besar kepada:

- Penanganan kemiskinan struktural secara lintas sektor;
- Peningkatan perlindungan anak dan perempuan;
- Penguatan layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kategori yang belum tercatat (nol kasus), guna memastikan apakah memang tidak ada kasus, atau justru terjadi underreporting akibat keterbatasan kapasitas pendataan di lapangan.

Berikut grafik hasil pendataan PMKS Kota Probolinggo mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:



Berdasarkan grafik diatas terlihat adanya perkembangan signifikan dalam upaya pendataan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama periode tiga tahun terakhir. Grafik ini menampilkan distribusi persentase data untuk masing-masing kategori PMKS pada tahun 2022 (hijau), tahun 2023 (oranye), dan tahun 2024 (biru).

Secara umum, grafik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cakupan pendataan pada tahun 2024 di hampir seluruh kategori PMKS, yang ditandai dengan dominasi warna biru pada batang grafik. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pendataan pada tahun 2024 telah mencakup populasi yang lebih luas dan lebih terperinci dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Kategori seperti Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana Alam, Fakir Miskin, dan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis mengalami peningkatan persentase yang signifikan pada tahun 2024, bahkan mendekati atau mencapai 100%. Fenomena ini menandakan bahwa program pendataan pada tahun tersebut dilaksanakan secara lebih menyeluruh dan efisien, baik dari sisi metodologi, sumber daya manusia, maupun penggunaan teknologi.

Beberapa kategori lainnya seperti Gelandangan, Pengemis, Pemulung, serta Korban Perdagangan Orang (*Trafficking*) juga menunjukkan tren pendataan yang meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, meskipun peningkatannya bervariasi. Pada beberapa kategori seperti Korban Napza, Pekerja Migran Bermasalah, dan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, terlihat bahwa pendataan pada tahun 2022 dan 2023 masih cukup minim, tetapi melonjak drastis pada tahun 2024. Hal ini menegaskan adanya perluasan fokus dan perhatian pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan yang sebelumnya kurang terjangkau.

Dari sisi perbandingan antar tahun, terlihat bahwa tahun 2022 memiliki cakupan pendataan yang paling rendah, yang dapat diinterpretasikan sebagai fase awal atau masa transisi dalam sistem pendataan PMKS. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang cukup moderat, namun masih terbatas pada kategori tertentu. Puncaknya, pada tahun 2024, hampir seluruh kategori PMKS tercakup secara maksimal, mencerminkan adanya perbaikan sistemik, peningkatan kapasitas pendata, serta kemungkinan

adanya instrumen kebijakan baru yang mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal. Diharapkan, data yang telah terkumpul ini dapat menjadi fondasi dalam merancang program intervensi sosial yang lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

5.2 Hasil Pendataan PMKS Tahun 2024 Per Kecamatan

Data hasil pendataan PMKS Kota Probolinggo Per Kecamatan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

A. Kecamatan Kademangan

NO	JENIS PMKS	KADEMANGAN	KETAPANG	PILANG	POHSA NGIT KIDUL	TRIWUNG KIDUL	TRIWUNG LOR	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0	0	0	0	0	0	0
2	ANAK TERLANTAR	24	0	0	0	0	0	24
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	0	0	0	0	0	0	0
4	ANAK JALANAN	0	0	0	0	0	0	0
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	12	10	11	8	4	5	50
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	0	0	1	0	0	1	2
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	42	15	21	16	7	11	112
8	LANJUT USIA TERLANTAR	10	2	3	8	3	0	26
9	PENYANDANG DISABILITAS	61	40	65	46	21	36	269
10	TUNA SUSILA	0	0	0	0	0	0	0
11	GELANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGEMIS	0	0	0	0	0	0	0
13	PEMULUNG	0	0	0	0	0	0	0
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	0	0	0	0	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)	0	0	0	0	0	2	2
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	2	0	0	0	2	2	6
17	KORBAN PENYALHUNAAN NAPZA	0	0	0	0	0	0	0
18	KORBAN TRAFICKING	0	0	0	0	0	0	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG	0	3	2	0	0	1	6

NO	JENIS PMKS	KADEMANGAN	KETAPANG	PILANG	POHSANGIT KIDUL	TRIWUNG KIDUL	TRIWUNG LOR	JUMLAH
	DIPERLAKUKAN SALAH							
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	0	0	0	0	0	0	0
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	37	168	29	33	25	23	315
24	FAKIR MISKIN	3734	2687	2568	3360	4419	2659	19427
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	2	1	2	2	0	1	8
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan hasil pendataan PMKS tahun 2024 di enam kelurahan pada wilayah kecamatan Kademangan (Kademangan, Ketapang, Pilang, Pohsangit Kidul, Triwung Kidul, dan Triwung Lor), diketahui bahwa jenis PMKS yang paling mendominasi adalah fakir miskin, dengan total mencapai 19.427 jiwa. Angka ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan sosial utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, terutama dalam menyediakan akses terhadap kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, perempuan rawan sosial ekonomi tercatat sebanyak 315 jiwa, dengan konsentrasi tertinggi di Kelurahan Ketapang, yang mengindikasikan kerentanan ekonomi perempuan masih cukup tinggi dan perlu ditangani melalui program pemberdayaan yang lebih responsif gender.

Penyandang disabilitas juga menjadi kelompok signifikan, sebanyak 269 jiwa, yang tersebar merata di seluruh kelurahan, menuntut peningkatan aksesibilitas layanan dan infrastruktur publik yang inklusif. Sementara itu, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus tercatat sebanyak 112 jiwa, mencerminkan tingginya kerentanan kelompok usia dini terhadap kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian. Hal ini memerlukan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan responsif.

Menariknya, beberapa jenis PMKS seperti tuna susila, pengemis, gelandangan, pemulung, korban trafficking, dan komunitas adat terpencil tercatat nol kasus. Namun, hal ini tidak serta merta menunjukkan ketiadaan

masalah, karena bisa juga terjadi akibat keterbatasan pelaporan atau pendataan di lapangan.

B. Kecamatan Kanigaran

NO	JENIS PMKS	CURAH GRINTING	KANIGARAN	KEBONSARI KULON	KEBONSARI WETAN	SUKOHARJO	TISNONGARAN	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0	0	0	0	0	0	0
2	ANAK TERLANTAR	2	10	0	0	4	0	16
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	0	1	1	0	0	0	2
4	ANAK JALANAN	0	4	4	0	1	0	9
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	9	30	20	5	3	4	71
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	2	6	2	0	2	1	13
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	21	80	49	12	63	10	235
8	LANJUT USIA TERLANTAR	4	6	3	2	11	4	30
9	PENYANDANG DISABILITAS	65	152	104	34	62	19	436
10	TUNA SUSILA	0	0	0	0	0	0	0
11	GELANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGEMIS	0	0	0	0	0	0	0
13	PEMULUNG	7	1	0	0	20	0	28
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	0	0	0	0	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)	1	1	2	1	2	0	7
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	1	0	1	2	1	0	5
17	KORBAN PENYALHGUANAAN NAPZA	0	0	0	0	0	0	0
18	KORBAN TRAFICKING	0	0	0	0	0	0	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	3	10	3	0	4	2	22
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	0	0	0	0	243	0	243

NO	JENIS PMKS	CURAH GRINTING	KANIGARAN	KEBONSARI KULON	KEBONSARI WETAN	SUKOHARJO	TISNONEGARAN	JUMLAH
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	11	216	45	10	105	19	406
24	FAKIR MISKIN	2175	6701	6673	3483	3275	1556	23863
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	0	4	3	1	2	2	12
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2024 di enam kelurahan di wilayah kecamatan Kanigaran, yaitu Curahgrinting, Kanigaran, Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, Sukoharjo, dan Tisnonegaran, diketahui bahwa jenis PMKS yang paling mendominasi adalah kategori fakir miskin dengan jumlah mencapai 23.863 jiwa. Angka tertinggi ditemukan di Kanigaran (6.701 jiwa) dan Kebonsari Kulon (6.673 jiwa). Fakta ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang sangat mendesak dan merata di hampir seluruh wilayah. Kondisi ini mencerminkan perlunya penanganan komprehensif dari pemerintah, mulai dari peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar hingga penciptaan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kelompok perempuan rawan sosial ekonomi juga mencatat angka yang tinggi, yaitu 406 orang, dengan angka tertinggi berada di Kanigaran dan Sukoharjo. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan gender dalam akses ekonomi, serta perlunya program-program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi yang menyoroti perempuan sebagai kelompok rentan. Demikian pula penyandang disabilitas mencatat jumlah signifikan sebesar 436 jiwa, tersebar di semua kelurahan, dengan dominasi tertinggi di Kanigaran dan Kebonsari Kulon. Hal ini menandakan pentingnya penyediaan layanan yang inklusif dan ramah disabilitas, baik dari segi fasilitas umum maupun layanan sosial dasar lainnya.

Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus juga menjadi salah satu kelompok yang besar jumlahnya, yakni 235 anak, menandakan adanya kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan, penelantaran, maupun kondisi sosial yang tidak layak. Ditambah lagi dengan 71 anak dengan kedisabilitasan

serta 13 anak korban kekerasan, kondisi ini menuntut perhatian serius dalam bentuk perlindungan anak yang menyeluruh dan integratif, serta pelibatan lembaga sosial dan pendidikan dalam mendampingi anak-anak dari kelompok rentan.

Kategori korban bencana alam muncul secara dominan di Kelurahan Sukoharjo dengan 243 kasus. Ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut cukup rentan terhadap bencana, dan perlu adanya kesiapsiagaan serta sistem mitigasi yang lebih kuat. Beberapa kategori PMKS lainnya seperti korban trafficking, tuna susila, gelandangan, pengemis, kelompok minoritas, dan komunitas adat terpencil tidak tercatat sama sekali, namun hal ini belum tentu menandakan tidak adanya masalah, melainkan mungkin akibat keterbatasan pelaporan atau pengidentifikasian di lapangan.

C. Kecamatan Wonoasih

NO	JENIS PMKS	JREBE NG KIDUL	KEDUN G ASEM	KEDUNG GALENG	PAKIST AJI	SUMBER TAMAN	WONO ASIH	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0	0	0	0	0	0	0
2	ANAK TERLANTAR	6	0	0	5	0	16	27
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	0	0	0	0	2	0	2
4	ANAK JALANAN	0	0	0	0	0	0	0
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	11	11	2	4	21	4	53
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	0	0	0	0	2	0	2
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	21	31	18	16	84	25	195
8	LANJUT USIA TERLANTAR	15	14	17	15	10	10	81
9	PENYANDANG DISABILITAS	81	75	59	47	71	36	369
10	TUNA SUSILA	0	0	0	0	0	0	0
11	GELANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGEMIS	0	0	0	0	0	8	8
13	PEMULUNG	0	0	0	0	0	0	0
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	0	0	0	0	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATA N (BWBLP)	1	1	0	0	2	1	5

NO	JENIS PMKS	JREBE NG KIDUL	KEDUN G ASEM	KEDUNG GALENG	PAKIST AJI	SUMBER TAMAN	WONO ASIH	JUMLAH
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	1	2	1	1	6	1	12
17	KORBAN PENYALHGUNAAN NAPZA	0	0	0	1	0	0	1
18	KORBAN TRAFICKING	0	0	0	0	0	0	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	1	0	0	0	2	0	3
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	0	40	60	0	185	0	285
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	33	59	18	13	35	17	175
24	FAKIR MISKIN	2641	4377	1931	3386	4372	2040	18747
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	1	2	2	1	0	2	8
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2024 di enam kelurahan pada wilayah kecamatan Wonoasih, yaitu Jrebeng Kidul, Kedung Asem, Kedung Galeng, Pakistaji, Sumber Taman, dan Wonoasih, terlihat bahwa kategori PMKS yang paling mendominasi adalah fakir miskin dengan total jumlah mencapai 18.747 jiwa. Angka tertinggi tercatat di Kedung Asem dan Sumber Taman, masing-masing melebihi 4.000 jiwa. Ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam konteks sosial di wilayah ini, dan perlu penanganan terpadu serta intervensi yang komprehensif dalam bentuk program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Kelompok penyandang disabilitas juga mencatat angka yang tinggi, yakni 369 jiwa, menunjukkan kebutuhan nyata akan sistem layanan sosial yang inklusif dan ramah disabilitas. Sementara itu, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 195 jiwa, dengan sebaran tertinggi di Sumber Taman dan Kedung Asem, menunjukkan bahwa anak sebagai kelompok rentan masih sangat membutuhkan perhatian dari berbagai sektor, khususnya

perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Anak dengan kedisabilitasan juga tercatat sebanyak 53 jiwa, yang memperkuat urgensi perlindungan sosial sejak usia dini.

Jumlah perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 175 jiwa, juga menjadi indikator penting mengenai kerentanan yang dihadapi perempuan di bidang ekonomi. Sebaran angka ini cukup merata, menandakan bahwa kondisi sosial perempuan memerlukan program pemberdayaan yang konsisten dan menyentuh akar permasalahan, seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses ekonomi, dan beban pengasuhan yang tinggi.

Kondisi lain yang menonjol adalah keberadaan korban bencana alam yang mencapai 285 jiwa, terutama berasal dari Kelurahan Sumber Taman, Kedung Asem, dan Kedung Galeng. Fakta ini menunjukkan adanya kerentanan geografis terhadap bencana dan menggarisbawahi perlunya sistem mitigasi, kesiapsiagaan, serta rehabilitasi sosial pascabencana yang lebih efektif. Beberapa jenis PMKS lainnya seperti tuna susila, gelandangan, pemulung, korban trafficking, dan komunitas adat terpencil tidak tercatat dalam data, yang bisa saja mencerminkan ketiadaan kasus, atau sebaliknya menunjukkan perlunya metode identifikasi yang lebih mendalam.

D. Kecamatan Kedopok

NO	JENIS PMKS	JREBENG KULON	JREBENG NG LOR	JREBENG WETAN	KARENG LOR	KEDO POK	SUMBER WETAN	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0	0	0	0	0	0	0
2	ANAK TERLANTAR	1	0	0	0	4	16	21
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	0	0	0	0	0	1	1
4	ANAK JALANAN	0	0	0	0	0	0	0
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	2	15	15	1	12	4	49
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	0	0	0	0	0	1	1
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	8	29	24	4	25	29	119
8	LANJUT USIA TERLANTAR	4	6	2	2	3	6	23
9	PENYANDANG DISABILITAS	55	121	35	25	58	46	340

NO	JENIS PMKS	JREBENG KULON	JREBENG LOR	JREBENG WETAN	KARENG LOR	KEDOPOK	SUMBER WETAN	JUMLAH
10	TUNA SUSILA	0	0	0	0	0	0	0
11	GELANDANGAN	0	0	0	0	0	0	0
12	PENGEMIS	0	0	0	0	0	0	0
13	PEMULUNG	0	0	0	0	0	0	0
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	0	0	0	0	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)	2	2	0	1	0	1	6
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	1	1	0	1	0	1	4
17	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	0	0	0	0	1	0	1
18	KORBAN TRAFICKING	0	0	0	0	0	0	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	0	1	4	0	0	1	6
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	0	1	0	0	1
21	KORBAN BENCANA ALAM	0	0	0	0	0	0	0
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	15	51	48	15	28	22	179
24	FAKIR MISKIN	2481	4589	1341	2931	2130	4052	17524
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	0	1	1	0	0	3	5
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data PMKS tahun 2024 pada kecamatan Kedopok di wilayah kelurahan Jrebeng Kulon, Jrebeng Lor, Jrebeng Wetan, Kareng Lor, Kedopok, dan Sumber Wetan, terlihat bahwa permasalahan sosial paling dominan masih berkaitan dengan kemiskinan. Fakir miskin tercatat sebanyak 17.524 jiwa, menjadikannya kategori dengan jumlah tertinggi secara signifikan. Jumlah ini tersebar merata di seluruh kelurahan, dengan angka tertinggi di Jrebeng Lor dan Sumber Wetan. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan penghidupan layak masih menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Penyandang disabilitas menempati posisi kedua dengan jumlah 340 jiwa, menunjukkan perlunya peningkatan dukungan terhadap kelompok ini, baik dalam hal akses layanan dasar, pendidikan, pelatihan kerja, maupun fasilitas publik yang ramah disabilitas. Disusul oleh perempuan rawan sosial ekonomi dengan jumlah 179 jiwa, yang menggambarkan adanya kerentanan ekonomi dan sosial yang masih tinggi di kalangan perempuan, khususnya mereka yang menjadi kepala keluarga atau hidup tanpa dukungan ekonomi memadai.

Anak yang memerlukan perlindungan khusus juga menjadi kelompok signifikan dengan jumlah 119 jiwa. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang berada dalam kondisi tidak aman atau rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, atau pengabaian, sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan ekstra dari keluarga, sekolah, serta lembaga perlindungan anak. Jumlah anak dengan kedisabilitasan juga cukup besar, yaitu 49 jiwa, menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam sistem pendidikan dan layanan sosial.

Kategori lanjut usia terlantar mencatatkan 23 jiwa, mengindikasikan pentingnya penguatan sistem dukungan bagi lansia, terutama mereka yang hidup sendiri atau tanpa penopang ekonomi. Sementara itu, beberapa kategori lain seperti bekas warga binaan, orang dengan HIV/AIDS, korban kekerasan, dan keluarga bermasalah sosial psikologis muncul dalam jumlah lebih kecil, namun tetap perlu diperhatikan karena mereka memerlukan pendekatan yang sensitif dan terintegrasi.

Sebaliknya, sejumlah kategori seperti anak balita terlantar, anak jalanan, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, korban trafficking, korban bencana, hingga komunitas adat terpencil tidak tercatat sama sekali. Hal ini bisa menunjukkan tidak ditemukannya kasus atau belum maksimalnya proses identifikasi dan pelaporan.

E. Kecamatan Mayangan

NO	JENIS PMKS	JATI	MANGUN HARJO	MAYANG AN	SUKABU MI	WIROBORANG	JUMLAH
1	ANAK BALITA TERLANTAR	0	0	0	0	0	0
2	ANAK TERLANTAR	0	0	0	8	0	8
3	ANAK YG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	0	1	0	1	0	2

NO	JENIS PMKS	JATI	MANGUN HARJO	MAYANGAN	SUKABUMI	WIROBORANG	JUMLAH
4	ANAK JALANAN	7	2	0	3	4	16
5	ANAK DENGAN KEDISABILITASAN	14	30	13	4	8	69
6	ANAK YG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	0	1	1	2	0	4
7	ANAK YG MEMERLUKAN PERLIDUNGAN KHUSUS	75	60	33	28	23	219
8	LANJUT USIA TERLANTAR	0	8	2	0	1	11
9	PENYANDANG DISABILITAS	135	119	104	80	48	486
10	TUNA SUSILA	0	0	0	0	0	0
11	GELANDANGAN	0	0	0	0	0	0
12	PENGEMIS	75	2	7	0	0	84
13	PEMULUNG	14	0	0	0	0	14
14	KELOMPOK MINORITAS	0	0	0	0	0	0
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN (BWBLP)	2	4	1	1	0	8
16	ORANG DENGAN HIV/ AIDS	0	1	2	1	1	5
17	KORBAN PENYALHGUNAAN NAPZA	1	0	0	0	0	1
18	KORBAN TRAFICKING	0	0	0	0	0	0
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU YANG DIPERLAKUKAN SALAH	1	1	4	4	0	10
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	0	0	0	0	0	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	119	0	0	0	0	119
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	0	0	0	0	0	0
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	220	313	137	25	21	716
24	FAKIR MISKIN	4907	6608	3853	2590	2214	20172
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	5	6	12	5	1	29
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan data PMKS tahun 2024 pada kecamatan Mayangan di wilayah kelurahan Jati, Mangunharjo, Mayangan, Sukabumi, dan Wiroborang

terlihat bahwa kelompok PMKS dengan jumlah terbesar secara signifikan adalah fakir miskin, yang tersebar merata di semua wilayah dengan total mencapai 20.172 orang. Selain itu, kelompok perempuan rawan sosial ekonomi juga memiliki angka yang cukup tinggi, mencapai 716 orang, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Mangunharjo dan Jati.

Kelompok penyandang disabilitas juga terlihat cukup banyak, dengan total 486 orang, yang mayoritas berada di wilayah Jati dan Mangunharjo. Kelompok anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus juga cukup menonjol, dengan total 219 anak yang tersebar di seluruh wilayah, terutama di Jati dan Mangunharjo. Kelompok lain yang juga terlihat signifikan adalah korban bencana alam yang mayoritas terkonsentrasi di wilayah Jati dengan jumlah 119 orang.

Beberapa jenis PMKS lain seperti anak jalanan (16 orang), pengemis (84 orang), dan korban tindak kekerasan atau perlakuan salah (10 orang) juga tercatat, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan kelompok fakir miskin atau penyandang disabilitas. Ada beberapa kategori yang tidak ditemukan sama sekali seperti tuna susila, gelandangan, dan korban trafficking.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tantangan sosial terbesar di wilayah-wilayah tersebut masih berfokus pada masalah kemiskinan, kerentanan sosial ekonomi perempuan, dan kebutuhan perlindungan anak serta penyandang disabilitas. Upaya penanganan sosial harus diprioritaskan terutama untuk kelompok-kelompok ini agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo Tahun 2024, yang dilakukan melalui metode kompilasi produk administrasi (kompromin) dan pengisian kuesioner Excel oleh petugas lapangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Jumlah dan Kategori PMKS

Total individu dan keluarga yang terdata sebagai PMKS di Kota Probolinggo mencapai jumlah signifikan, dengan dominasi pada kategori fakir miskin, anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Terdapat pula kasus-kasus PMKS dalam kategori lansia terlantar, korban kekerasan, serta gelandangan dan pengemis, meskipun dalam jumlah lebih kecil.

B. Sebaran Wilayah PMKS

Pendataan menunjukkan sebaran PMKS yang tidak merata. Kecamatan Mayangan dan Wonoasih tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PMKS tertinggi, dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan kondisi sosial ekonomi setempat. Sementara wilayah seperti Kademangan menunjukkan angka yang relatif lebih stabil.

C. Kondisi Sosial dan Akses Layanan

Sebagian besar PMKS di Kota Probolinggo masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ini mengindikasikan perlunya penguatan intervensi berbasis komunitas dan kemitraan lintas sektor.

D. Efektivitas Pendataan dan Kolaborasi

Proses pendataan berlangsung cukup efektif berkat kerja sama antara Dinas Sosial, petugas lapangan (TKSK, PSM), dan lembaga sosial setempat. Penggunaan instrumen kuesioner Excel memudahkan standardisasi data dan pengelolaan digital untuk keperluan analisis lebih lanjut.

E. Rekomendasi Tindak Lanjut

Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan dapat memanfaatkan data ini sebagai dasar perencanaan program intervensi sosial yang lebih tepat sasaran, serta memperkuat sistem pemantauan dan pemutakhiran data PMKS secara berkala di setiap kelurahan.



BAB VII

PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar perencanaan program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Probolinggo, dengan tujuan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sosial masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah.

Melalui proses pendataan, analisis, serta pemetaan kebutuhan sosial, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sebaran dan karakteristik PMKS di setiap wilayah. Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penanganan PMKS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat, lembaga sosial, serta stakeholder terkait. Sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan Kota Probolinggo yang lebih peduli, tangguh, dan sejahtera bagi seluruh warganya, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan dukungan dan perhatian berkelanjutan.

BAB VIII LAMPIRAN

8.1 Format Form Pendataan PMKS

Instrumen yang digunakan dalam pendataan PMKS tahun 2024, sebagai berikut:

NO	NAM A	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT	KECAM ATAN	KELUR AHAN	JENIS PMKS	JENIS DISABILITAS
1								
2								
3								
4								
5								
dst.								

8.2 Dokumentasi Pelaksanaan Pendataan PMKS



